

**EFEKTIVITAS KEPEMIMPINAN SEKTOR PUBLIK KEPALA DESA DI DESA
NAGORI PARDOMUAN TONGAH KECAMATAN SILOU KAHEAN KABUPATEN
SIMALUNGUN**

Johnson Pasaribu¹, Maringan Panjaitan², Siska Novita Saragih³

^{1,2,3} Universitas HKBP Nommensen

Email Korespondensi: jhonson.pasaribu@uhn.ac.id

ABSTRACT

Public sector leadership is a very important part of service and is the true essence of leadership as the main part of public service. How public sector leadership can work well so that there is increased community participation is certainly a very important discussion. This research was conducted to see the effectiveness of the village head's leadership in motivating village community participation to improve village infrastructure development. Based on the problems studied, this method and research uses qualitative descriptive research. The results of the research show that the village head of Nagori Pardomuan Tongah has made efforts and roles, such as inviting the community to take part in various village activities with the aim of increasing community participation in development in accordance with the content, aims and intentions of each development program to be implemented in accordance with his responsibilities and the community as a supporting factor; it is stated that the village head is carrying out his role as less effective. The efforts made by the government in overcoming these obstacles are the village head of Nagori Pardomuan Tongah as a driver and motivator in better village development, the village head should increase motivation to be used as a channel to convey information from each development program, the village head must increase the intensity of implementing development activities with the community for the welfare of the people in the village.

Keywords: Public Sector Leadership, Effectiveness of Village Head leadership, Village community participation, Development.

ABSTRAK

Kepemimpinan sektor publik adalah bagian dari pelayanan yang sangat penting dan merupakan hakikat asli kepemimpinan sebagai bagian utama dari pelayanan publik. Bagaimana kepemimpinan sektor publik bisa bekeja dengan baik sehingga ada peningkatan partisipasi masyarakat tentu jadi sebuah pembahasan yang sangat penting. Penelitian ini dilakukan untuk melihat, Efektivitas kepemimpinan kepala Desa Dalam Memotivasi Partisipasi masyarakat desa untuk meningkatkan Pembangunan Infrastruktur desa. Berdasarkan Permasalahan yang diteliti, metode dan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kepala desa Nagori Pardomuan Tongah telah melakukan upaya dan perannya, seperti mengajak masyarakat untuk ikut dalam berbagai kegiatan desa dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan isi, tujuan dan maksud dari setiap program-program pembangunan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan masyarakat sebagai faktor pendukungnya dinyatakan kepala desa menjalankan perannya Kurang Efektif. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah, kepala desa Nagori Pardomuan Tongah sebagai penggerak dan motivator dalam pembangunan desa lebih baik, maka kepala desa agar meningkatkan motivasi-motivasi untuk digunakan sebagai saluran untuk menyampaikan informasi dari setiap program pembangunan, kepala desa harus lagi meningkatkan intensitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan dengan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat di desa.

Kata kunci: Kepemimpinan Sektor Publik, Efektivitas kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi masyarakat desa, Pembangunan

PENDAHULUAN

Salah satu peran dari pemerintah adalah menggerakkan pembangunan dalam masyarakat, demi terciptanya kehidupan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Di sadari bahwa peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan merupakan bagian dari tugas dalam menjalankan pemerintahan, baik pemerintah Pusat, Daerah, Kecamatan bahkan pedesaan.

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dimana didalamnya ada yang mengatur tentang desa. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan Pemerintah Desa yaitu penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong – royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan demikian fungsi Kepala Desa terhadap pembangunan desa adalah sebagai pemikir, perencanaan, dan pelaksana.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya ataupun luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah. Kepala desa juga harusnya berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Karena masyarakat juga bagian dari suksesnya program desa, masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari pembangunan, perlu adanya suatu koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat agar yang menjadi cita-cita bersama yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat dapat diwujudkan.

Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara maksimal, bilamana kepala desa sebagai orang yang terdepan dengan memiliki kewenangan untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan yang bersifat apatis atau acuh tak acuh terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya maka yang akan terjadi adalah kefakuman. Kondisi dari kenyataan tersebut, Kepala Desa harus mampu memposisikan dirinya sebagai pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Keadaan inilah terkadang kurang dipahami oleh pemerintah desa sehingga antara harapan masyarakat dengan kenyataan yang dihadapi tidak pernah bersentuhan, dengan kata lain antara ketentuan dengan rasa ego yang saling berhadapan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan pemerintah desa diberikan kewenangan yang sangat besar, itu tercermin dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa. Dimana pemerintahan desa bertugas melaksanakan pembangunan. Artinya, bahwa pemerintah melalui kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan yang ada didesa tersebut. Undang-Undang No 6 tahun 2014 Pasal 1 ayat (26), kepala desa bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dsa.

Pemerintah desa seharusnya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (pelaksanaan implementasi) daripada proses pembangunan. Tercapainya tujuan dari pembangunan, perlu adanya suatu koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat desa agar yang menjadi cita-cita dapat diwujudkan. Pembangunan desa akan berhasil baik apabila didukung oleh partisipasi seluruh warga masyarakat. Dan optimalisasi pembangunan sangat dipengaruhi oleh bagaimana fungsi yang dijalankan oleh pihak pemerintah sebagai koordinator pelaksana pembangunan. Dalam hal ini pemerintah harus mampu mengkoordinasikan berbagai unit dalam pemerintahan agar dapat mendayagunakan fungsi mereka dengan baik dan memberikan kontribusi

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



yang nyata bagi proses pembangunan. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam memotivasi partisipasi masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode deskriptif, yaitu setiap data-data dan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian dilaporkan dideskriptifkan atau digambarkan sebagaimana adanya yang diiringi dengan penafsiran dan analisis yang rasional. Untuk itu analisa data dalam penelitian ini adalah menggambarkan dan menjelaskan variabel-variabel yang berkaitan dengan Efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam memotivasi partisipasi masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa. Melalui penyajian data yang telah diperoleh melakukan penelitian di desa Nagori Pardomuan Tongah baik dengan melakukan wawancara dengan kepala desa, kepala dusun dan masyarakat desa. Maka dilakukanlah analisa terhadap setiap data dan fakta-fakta yang telah didapat melalui interpretasi dan penguraian masalah-masalah yang terjadi.

PEMBAHASAN

Peran kepala deasa dalam meningkatkan pembangunan

Tanggung jawab atas keberhasilan pembangunan desa Nagori Pardomuan Tongah bukanlah semata-mata dibebankan kepada kepala desa dan lembaga lain yang terlibat dalam pembangunan saja, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat desa tersebut untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan setiap program-program pembangunan.

Fungsi instruktif, menentukan perintah, mengerjakan perintah, bagaimana cara pengerjaan.

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Kepala sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, secara efektif. Kepemimpinan efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan.

Untuk menumbuhkan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap program pembangunan, maka peranan kepala desa sebagai motivator dalam menyampaikan informasi-informasi tentang pembangunan desa Nagori Pardamean Tongah mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan sangatlah diperlukan, karena tanpa adanya komunikasi dari kepala desa, maka penyelenggaraan setiap program pembangunan tidak mungkin sampai kepada masyarakat secara baik.

Peran kepala desa sebagai sumber informasi dalam pembangunan desa menyediakan wadah didalam menyampaikan setiap program-program pembangunan. Didalam melakukan proses partisipasi, wadah partisipasi merupakan sarana atau saluran untuk menyalurkan informasi yang disampaikan. Oleh karena itu, wadah yang digunakan kepala desa Nagori Pardomuan Tongah didalam melakukan partisipasi haruslah sesuai dengan tujuan, isi dan maksud dari setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun wadah-wadah partisipasi yang digunakan oleh kepala desa Nagori Pardomuan Tongah dalam menyampaikan setiap program-program pembangunan desa antara lain adalah melalui ide atau buah pikiran masyarakat. Ide masyarakat ini merupakan usulan yang disampaikan melalui musyawarah desa.

Namun, melalui wadah tersebut, masyarakat desa Nagori Pardomuan Tongah kurang kreatif dalam mengeluarkan ide atau pendapat dalam bidang pembangunan, dimana masyarakat lebih cenderung menerima begitu saja keputusan yang dibuat oleh kepala desa. Hal ini terjadi karena masyarakat memberikan kepercayaan atau menyerahkan masalah pembangunan yang akan dilaksanakan penuh kepada kepala desa, walaupun pada akhirnya pembangunan desa yang dilakukan itu berjalan dengan apa adanya. Padahal kepala desa sangat membutuhkan ide-ide yang inovatif dan kreatif dari masyarakat setempat mengenai proses-proses pelaksanaan pembangunan maupun hasil pemeliharaan dari pembangunan yang telah dikerjakan.

Berdasarkan hasil penelitian maka kepala desa dalam melaksanakan fungsi instruktif sudah ada, hal ini dapat dilihat bahwa pembangunan yang masuk merupakan hasil dari instruksi dari kepala desa itu sendiri baik dalam proses pelaksanaan maupun yang akan di rencanakan bersama dengan masyarakat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



maupun aparat desa, tanpa adanya instruksi dari kepala desa semua pembangunan yang ada belum tentu masuk ke desa.

Fungsi konsultatif, cara menetapkan tujuan

Fungsi ini digunakan sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan masyarakat-masyarakat yang dipimpinnya yang dinilai memiliki berbagai bahan informasi dalam menciptakan keputusan.

Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan pada masyarakat yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan pembangunan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan menjalankan fungsi konsultasi diharapkan keputusan pimpinan akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksinya, sehingga kepemimpinan berlangsung efektif.

Dari hasil penelitian menyediakan bahwa kepala desa dalam melaksanakan fungsi konsultatif sudah berusaha untuk berkonsultasi kepada masyarakat dan hasil pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Fungsi partisipasi, mengaktifkan orang-orang dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya.

Guna menjalankan fungsi ini kepala desa berusaha mengaktifkan kemasyarakatannya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semaunya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerjasama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Kepala desa merupakan simbol formil kesatuan masyarakat desa, sebagai badan kekuatan terendah, kepala desa dalam fungsi kepemimpinan memiliki berbagai fungsi untuk mengatur masyarakat desanya sendiri dan bertanggung jawab atas segala tugas yang diembannya. Mengingat desa merupakan tempat segala urusan dari segenap urusan dari segenap unsur kepala yang ada di atasnya, maka seorang kepala desa berkewajiban menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam masyarakat desa disamping harus menghadapi arus dan tuntutan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Kepemimpinan merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam mempengaruhi orang lain, untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya. Kepemimpinan merupakan interaksi antar kelompok dan proses mempengaruhi kegiatan suatu organisasi. Dalam mencapai tujuannya, kepemimpinan adalah proses interpersonal yang mempengaruhi kegiatan orang lain dalam memilih dan mencapai tujuan.

Berdasarkan pandangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, menggerakkan, menuntun, mengajak dan kalau perlu memaksa orang lain agar dapat berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian sesuai hasil penelitian yang penulis sajikan bahwa fungsi kepemimpinan kepala desa sebagai administrator dalam pembangunan cukup maksimal.

Fungsi delegasi, melimpahkan wewenang sementara kepada bawahan

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan kepala desa. Fungsi delegasi ini pada dasarnya berarti kepercayaan. Pelimpahan wewenang ini kepada bawahan harus diyakini yang merupakan pembantu pimpinan yang memiliki kesamaan prinsip dan aspirasi. Berdasarkan hasil penelitian di desa Nagori Pandomuan Tengah fungsi kepala desa memberikan wewenang kepada bawahan belum maksimal, dikarenakan dalam hal ini kepala desa memberikan wewenang pada bawahannya berkenaan tidak hadir. Seharusnya kepala desa harus memberikan wewenangnya kepada bawahannya pada saat merencanakan pembangunan maupun dalam pelaksanaan.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa

Wujud atau dimendi partisipasi yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya pembangunan desa adalah pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Semakin tinggi peran serata masyarakat desa tersebut, maka semakin cepat pula pembangunan desa yang bersangkutan dapat terealisasi, terutama dalam otonomi daerah sekarang ini. Dengan keberadaan delegasi masyarakat desa dalam pembangunan sangatlah penting, dimana terbukanya kran partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerahnya.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi yang diberikan oleh masyarakat desa Nagori Pardomuan Tongah adalah sebagai berikut :

a) Partisipasi dalam bentuk uang atau benda

Salah satu dari bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pembangunan di desa Nagori Pardomuan Tongah adalah dalam bentuk uang atau benda, yaitu merupakan bantuan dana yang sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan dari program-program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau benda ini tentunya akan sangat mendukung pelaksanaan program pembangunan desa. Dimana bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang didukung berupa uang atau benda adalah merupakan suatu upaya yang sangat nyata, maka untuk itu kepala desa harus bijak memergunakan anggaran-anggaran bantuan dana pembangunan, dengan demikian pembangunan dengan demikian pembangunan akan berjalan dengan baik dan lancar.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat desa dalam bentuk uang atau benda kurng berpartisipasi, dimana rata-rata masyarakat di desa Nagori Pardomuan Tongah tergolong masyarakat merasa berat atau terbeban untuk turut serta memberikan partisipasi dalam bantuan uang atau dana.

b) Partisipasi dalam bentuk pikiran atau ide

Gagasan atau ide yang inovatif dapat menunjang kerberhasilan suara recana yang telah ditetapkan dan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, sumbangan pikiran berupa saran maupun ide-ide sangat diharapkan dapat membantu dalam upaya pencapaian dan perbaikan program-program pembangunan yang akan ada telah dilakukan supaya mencapai hasil yang maksimal.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk pikiran atau ide adalah bentuk partisipasi yang tidak kalah pentingnya dari partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau benda yang biasanya disampaikan dalam musyawarah atau penyampaian program-program pembangunan desa.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, partisipasi masyarakat desa Nagori Pardomuan Tongah dalam bentuk pikiran dan ide masih sangat kurang, dimana masih ada masyarakat yang tidak ikut serta menyumbangkan pikiran dan ide yang cemerlang dan kreatif untuk keberhasilan pembangunan yang akan dilaksanakan.

c) Partisipasi dalam bentuk tenaga (gotong royong)

Tingkat partisipasi masyarakat yang paling sederhana dan lazim diberikan oleh anggota masyarakat dalam membantu mensukseskan pelaksanaan suatu program pembangunan adalah berupa tenaga atau dapat disebut dengan gotong royong. Gotong royong adalah pengerahan tenaga kerja tanpa bayaran untuk proyek yang bermanfaat untuk umum atau yang berguna untuk kepala.

Dalam uraian diatas bahwa aktivitas selalu diiringi dengan pengerahan tenaga tanpa pamrih untuk kepentingan umum atau bersama. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program-program pembangunan didesa Nagori Pardomuan Tongah, kegiatan gotong royong selalu dilaksanakan untuk meringankan pelaksanaan program-program pembangunan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa partisipasi masyarakat desa Nagori Pardomuan Tongah dalam bentuk tenaga atau gotong royong sudah ada.

Keterlibatan masyarakat dalam penetapan program pembangunan desa.

Untuk melaksanakan suatu pembangunan, keterlibatan masyarakat sangatlah diperlukan. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat berupa partisipasi dalam kegiatan perencanaan, partisipasi ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa. Namun tidak hal mudah dalam membangun partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com / admin@lkispol.or.id

Indexed:



membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepala desa sudah melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penetapan program desa.

Kesesuaian pembangunan desa yang akan dilakukan dengan kebutuhan masyarakat

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi dan kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat tidak puas dengan keadaan saat ini dirasakan oleh masyarakat yang kurang ideal. Namun demikian, perlu disadari bahwa pembangunan adalah suatu proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah yang sedang dihadapi. Pembangunan desa hendaknya mempunyai sasaran yang tepat, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap atau paling tidak pembangunan yang dilakukan dapat mendukung kemajuan masyarakat, baik dalam kemajuan bidang ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Namun pembangunan yang dilakukan khususnya pembangunan desa tersebut tidak akan dapat tercapai apabila masyarakat dan kepala desa tidak saling bekerjasama untuk kemajuan desa. Adanya kerjasama antara kepala desa dengan masyarakat tergantung kepada kepala desa yaitu kepala desa dan aparat desa, karena merekalah pemimpin atau aktor terlaksananya pembangunan desa yang dilakukan, dimana kepala desa berperan dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan yaitu berpartisipasi untuk keberhasilan pembangunan. Didesa Nagori Pardamean Tengah pembangunan yang dilakukan masih relatif rendah, bahkan bisa dikatakan minim. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas untuk mengadakan rapat tidak ada, sehingga rapat atau pertemuan-pertemuan seingkali dilakukan di rumah kepala desa.

Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila pembangunan yang dilakukan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh seluruh rakyat masyarakat, tanpa ada yang merasa dirugikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pembangunan didesa Nagori Pardamean Tengah susah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adapun pembangunan yang sudah sesuai yaitu pembangunan akses jalan pertanian untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kerjasama antara kepala desa dengan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan

Dengan lahirnya otonomi daerah maka kepala desa dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan partisipasinya dalam pembangunan. Dengan melibatkan adanya partisipasi masyarakat, maka masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.

KESIMPULAN

Sebagai hasil akhir penelitian tentang Efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam memotivasi partisipasi masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa (studi partisipasi masyarakat di desa Nagori Pardomuan Tengah), dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan kepala desa Nagori Pardomuan Tengah telah melakukan upaya dan perannya, seperti mengajak masyarakat untuk ikut dalam berbagai kegiatan desa dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan isi, tujuan dan maksud dari setiap program-program pembangunan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan masyarakat sebagai faktor pendukungnya dinyatakan kepala desa menjalankan perannya dengan baik.
2. Kepala desa dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya di desa Nagori Pardomuan Tengah berdasarkan hasil penelitian sudah maksimal karena kepala desa bersosialisasi kepada masyarakat maupun aparat desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.

3. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan masyarakat desa Nagori Pardomuan Tongah sudah merasakan keefektifan kepala desa dalam upaya peningkatan pembangunan desa. Dan pembangunan saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sudah beberapa program pembangunan sudah dinikmati masyarakat.
4. Partisipasi masyarakat dalam bentuk uang atau benda, partisipasi masyarakat dalam bentuk ide dan pikiran serta partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga (gotong royong). Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan masih rendah, hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat status sosial ekonomi rata-rata masyarakat desa, rendahnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat desa.

REFERENSI

- Hasibuan, m. (2000). *Managemen sumberdaya Manusia*. jakarta: PT.Bumi Aksara.
- John.W.Cresswel. (2013). *Research Design Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif and Mixed*. Yogyakarta: pustaka pelajar,2013, edisi ke 3.
- Kaho, J. (2002). *prosfek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartono. (2008). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Yogyakarta: adi cita karya nusa.
- Loekman, S. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisusu.
- Makmur. (2011). *Efektifitas kelembagaan pengawasan* . Jakarta: 2013.
- Prof.Dr.Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* . Bandung: 2016.
- Sartono, M. d. (1998). *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*. yogjakarta: liberty.
- Siagian, S. P. (1983). *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung agung.
- undang-undang desa no 6 tahun 2014*.
- <http://digilib.Jurnal.unila.ac.id,KBBI>, <http://KBBI.web.id/Efektifitas.html,KBBI>,
<http://KBBI.web.id/Kepemimpinan.html.KBBI>, [http://KBBI.web.id/Motivasi.html.\(t.thn.\)](http://KBBI.web.id/Motivasi.html.(t.thn.)).